



FEB UNMUL

## PENGARUH PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jesni<sup>1</sup>, Yunus Tete Konde<sup>2</sup>, Ledy Setiawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda

. E-mail: yunus.tete.konde@feb.unmul.ac.id

---

### Article History

Received: 2022-09-29

Accepted: 2022-09-29

### DOI:

Copyright@year  
owned by Author(s).  
Published by JIAM.

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja dan merupakan Variabel Independen adalah Akuntabilitas Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sampel sebanyak 31 pegawai ASN. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden dalam bentuk pertanyaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Kata kunci:** Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas Kinerja

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to determine the effect of implementing financial accountability on the performance accountability of the education and culture Office of Kutai Kartanegara District. The dependent variables in this study are performance accountability and are independent variables are financial accountability. The population in this research is the officer of the Education and culture Office of Kutai Kartanegara District with a sample of 31 ASN employees. The type of data used is primary data by spreading the questionnaire to the respondent in the form of a question. The results showed that the implementation of financial accountability has a positive and insignificant effect on the performance accountability of Kutai Kartanegara District education and Culture office.*

**.Key words:** *financial accountability, performance accountability*

## A. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap publik, dimana kinerja itu sendiri adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Akuntabilitas publik seharusnya tidak hanya memusatkan pada pemanfaatan sumberdaya (*input*) semata tetapi juga pada kinerjanya sehingga terbentuk suatu akuntabilitas kinerja. Dalam upaya mewujudkan praktik akuntabilitas tersebut, setiap SKPD diwajibkan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPj) kepada pemerintah daerah yang kemudian harus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas kinerjanya secara horizontal kepada DPRD dan pihak terkait dan akuntabilitas secara vertikal dengan menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Pemerintah secara berjenjang. LAKIP dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. Penanggungjawab LAKIP adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melakukan dukungan administratif di instansi masing-masing. Sebagaimana dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999, pejabat yang bertanggungjawab dalam penyusunan LAKIP dapat menentukan tim kerja yang bertugas membantu penanggungjawab LAKIP di instansinya masing-masing.

Dalam penelitian ini penulis memilih objek penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan melihat Pendidikan merupakan elemen penting dalam masyarakat, tentunya bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Pendidikan termasuk dalam Dinas yang paling banyak menyerap anggaran dari APBN/APBD dalam menjalankan kinerjanya. Tentunya masyarakat berharap hal tersebut dibarengi dengan kinerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berdampak dan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum secara optimal dalam menyajikan Akuntabilitas Keuangannya. Apabila hal tersebut terus terjadi akan menimbulkan kecurigaan publik akan kinerja instansi pemerintah dan sudah seharusnya pemerintah daerah mengevaluasi proses akuntabilitas dilingkungan pemerintah yang ada untuk perbaiki kedepannya. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mewajibkan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam hal akuntabilitas secara efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara"

## KAJIAN PUSTAKA

### Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas berkaitan erat dengan alat untuk mengontrol dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan pertanggungjawaban secara transparan kepada pihak berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2012) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, meyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. seperti dikutip LAN dan BPKP (2000) prinsip – prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah adalah komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, serta suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, juga jujur ,objektif,

transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

**Jenis-Jenis Akuntabilitas**

Halim & kusufi (2012) mengemukakan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang tinggi, seperti kepada pembina apabila organisasi keagamaan tersebut memakai sistem struktural.
2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

**Akuntabilitas Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dilihat dari hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. serta informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN & BPKP, 2000).

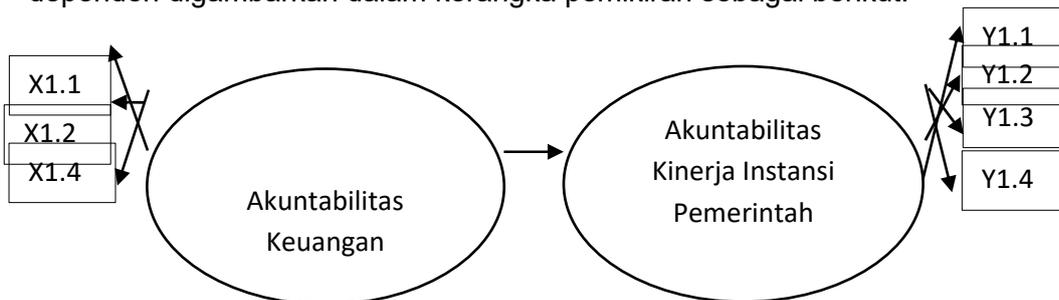
**Akuntabilitas Kinerja**

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Rbkunwas 2016, 05:56 menjelaskan tata kelola akuntabilitas pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, baik penyelenggaraan progam dan kegiatan harus mencapai hasil yang memiliki manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik pemerintah dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

**Kerangka Model Penelitian**

Pelaksanaan AKIP sendiri haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditetapkan oleh kepala lembaga administrasi Negara. Sehingga, dapat dilihat faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri, salah satunya akuntabilitas keuangan. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar. Kerangka Model Penelitian**

H<sub>1</sub>: Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pajak memegang peranan penting dalam negara kita, karena Pajak merupakan sumber pendapatan yang cukup besar bagi negara. Di dalam RAPBN kita bisa melihat target penerimaan khususnya penerimaan yang berasal dari pajak, dan setiap tahun pemerintah selalu berupaya menaikkan target tersebut. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat yang bersifat memaksa. Ketentuan ini diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Namun pada masih ada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, yaitu membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan-perusahaan sering kali melakukan hal itu, dikarenakan beban pajak ini mengurangi laba bersih perusahaan tersebut. Tetapi ada perusahaan yang melakukan perencanaan pajak, dimana hal ini juga mengurangi beban pajak perusahaan namun sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Artinya perusahaan akan melakukan segala cara untuk dapat menekan beban pajak tersebut dan mendapatkan laba yang diinginkan. Aktivitas ini disebut juga dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Contoh kasus agresivitas pajak pada perusahaan di Indonesia salah satunya pada tahun 2014 PT CCI (Coca-Cola Indonesia) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak sebesar 49,24 miliar (Djumena, 2014).

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Mengetahui seberapa besar pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.

## **B. METODE**

### **Definisi Operasional**

#### 1. Variabel independen (bebas)

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2013). Variable Independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kutai Kartanegara merupakan tanggungjawab instansi pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik yang telah dipercayakan dengan tidak melupakan kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu mengenai integritas, pengungkapan, dan peraturan perundang-undangan melalui laporan keuangan.

#### A. Variabel dependen ( terikat)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, yang menjadi variabel dependen ialah Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pertanggungjawaban mengenai hasil penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

### **Populasi dan Sampel**

Populasi bisa berupa subyek maupun objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dari instansi pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sampel dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

## Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. dalam penelitian ini penulis meperoleh data yang diperlukan dengan cara menyebarkan kuisioner. Kuisisioner yang digunakan peneliti berisi daftar pernyataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Peneliti menggunakan skala likert dalam pengukuran dan perhitungan jawaban dari hasil kuesioner.

## Alat Analisis

*Partial Least Square* (PLS) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*. Jogiyanto & Willy (2015) menjelaskan *Outer Model* merupakan pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Sedangkan *Inner Model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variable laten. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori keagenan merupakan hubungan kontrak kerja antara prinsipal dan agen, dimana dalam hubungan kontrak tersebut pihak prinsipal sebagai pemilik sekaligus investor mendelegasikan tugas kepada agen untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Teori keagenan menghubungkan aspek perilaku manusia di mana dalam teori ini mengasumsikan bahwa baik pemilik modal (prinsipal) maupun pengelola (agen) adalah pihak yang rasional serta memiliki kepentingan masing-masing. Pihak yang rasional tentunya akan memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Jika kedua belah pihak dalam hubungan tersebut adalah pemaksimal utilitas, ada alasan kuat untuk percaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model Pengukuran *Outer Model*

#### Uji Validitas

##### 1. Validitas Konstruk

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa sebagian besar item (indikator) telah menunjukkan syarat uji validitas sebagai data analisis yaitu karena nilai *loading factor* lebih dari 0,70 atau AVE atau *Communality* > 0.50 sedangkan item yang lain telah valid karena nilai *loading factor* di atas 0,70 atau AVE atau *Communality*> 0.50.

Konstruk	Outer Loading	Outer Loading	AVE
X1	0,838		0,689
X2	0,834		
X4	0,828		
X5	0,825		
X6	0,910		
X7	0,761		
X8	0,806		
Y1		0,536	
Y10		0,900	
Y12		0,698	
Y13		0,603	
Y14		0,811	
Y2		0,891	
Y3		0,788	
Y4		0,863	

Konstruk	Outer Loading	Outer Loading	AVE
Y5		0,807	
Y6		0,865	
Y7		0,651	
Y8		0,900	
Y9		0,771	

## 2. Discriminant Validity

*Discriminant validity* dari model pengukuran (*outer model*) dengan indikator formatif dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk.

Konstruk	Cross Loading	Cross Loading
X1	0,838	
X2	0,834	
X4	0,828	
X5	0,825	
X6	0,910	
X7	0,761	
X8	0,806	
Y1		0,536
Y10		0,900
Y12		0,698
Y13		0,603
Y14		0,811
Y2		0,891
Y3		0,788
Y4		0,863
Y5		0,807
Y6		0,865
Y7		0,651
Y8		0,900
Y9		0,771

## Uji Reabilitas

### 1. Reabilitas Konstruk (*Reliability Construct*)

Reliabilitas konstruk dari *measurement model* dengan indikator refleksif dapat diukur dengan melihat nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Suatu konstruk dikatakan *reliable* jika nilai *composite reliability* di atas 0,70.

**Tabel Composite Reliability**

	<b>Composite Reliability</b>
X (Akuntabilitas Keuangan)	0,939
Y (Akuntabilitas Kinerja)	0,953

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk semua konstruk adalah di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria *reliable*

**Tabel Cronbach Alpha**

	<b>Cronbachs Alpha</b>
X (Akuntabilitas Keuangan)	0,929
Y (Akuntabilitas Kinerja)	0,949

Nilai yang disarankan adalah di atas 0,6 dan pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua konstruk berada di atas 0,6. Selain dari *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*, untuk menilai reliabilitas suatu konstruk dapat dilakukan dengan melihat *Average Variance Extracted (AVE)* dan membandingkan nilai akar AVE dengan nilai korelasi antar konstruk.

**Tabel Laten Variable Correlations**

<b>Latent Variable Correlations</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>
X (Akuntabilitas Keuangan)	1,000	0,340
Y (Akuntabilitas Kinerja)	0,340	1,000

**Tabel AVE dan Akar AVE**

	Average Variance Extracted (AVE)	Akar Average Variance Extracted (AVE)
X (Akuntabilitas Keuangan)	0,689	0,830
Y (Akuntabilitas Kinerja)	0,615	0,784

**Model Struktural atau Inner Model**

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

**Tabel R Square**

<b>R Square</b>	
X (Akuntabilitas Keuangan)	0,116
Y (Akuntabilitas Kinerja)	

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *R-square* variabel Akuntabilitas Kinerja adalah sebesar 0,116. hal ini menunjukkan bahwa hanya 11,6% variable akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas keuangan dan sisanya 88,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

**Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode *resampling bootstrapping*. Uji statistik yang digunakan adalah uji t-statistik. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output Smartpls 3.0 sebagai berikut :

**Tabel Path Coefficient**

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
X -> Y	0,340	0,315	0,346	0,983	0,326

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan bootstrapping dari analisis output SmartPLS hasil penelitian untuk pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan Akuntabilitas Keuangan (X) dengan Akuntabilitas Kinerja (Y) dengan nilai t-statistik sebesar 0,983 atau <1,64 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menunjukkan bahwa hipotesis yang dibuat ditolak.

### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis**

Pada hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif tetapi variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara hal ini berdasarkan dengan hasil output program smartPLS dengan metode bootstrapping yang menghasilkan nilai original sample senilai 0,340 dan t-statistic sebesar 0,983 kurang dari nilai kritis 1,64. Hasil Penelitian ini menunjukkan ketidaksamaan dengan yang diteliti oleh Gistyan (2014) dimana penerapan akuntabilitas keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Siak Sri Indrapura. Begitu juga dengan Rofika & Ardianto (2014) yang menyimpulkan penerapan akuntabilitas keuangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyajikan pelaporan penggunaan anggaran disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh (akuntabilitas keuangan) dalam hal efisien dan efektif belum secara optimal, banyaknya sasaran yang belum berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran belum mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Keefektifan itu dapat terjadi apabila anggaran yang ditargetkan sesuai dengan realisasi yang dilakukan. Efisiensi dan efektivitas dapat melihat sejauh mana suatu keadaan keuangan, mempergunakan atau memanfaatkan sumber daya yang ada secara ekonomis, secara tepat dan memenuhi sasaran.

Hal ini menunjukkan apabila faktor lainnya konstan, maka Penerapan Akuntabilitas Keuangan akan menyebabkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip LAKIP sendiri berdasarkan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah haruslah jujur, objektif, transparan terhadap keuangan dan akurat, dimana ketika pemerintah dapat melaporkan kinerjanya baik itu keuangan secara akuntabel, maka akan berdampak pada pertanggung jawaban kinerjanya yang dilaporkan dalam LAKIP. Untuk pelaksanaan penerapan akuntabilitas sendiri haruslah didukung oleh peraturan perundangan yang memadai dan ketaatan pelaksanaan kelembagaan seperti penerapan *reward system* dan *punishment* secara konsisten dan memperbaiki format laporan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundangan pun akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Taat terhadap peraturan perundangan pemerintah hal itu diperkuat dengan komitmen terhadap organisasinya yang tinggi, sehingga hal tersebut dapat menunjang dalam pekerjaannya yang menghasilkan kinerja yang baik, kinerja yang baik tersebut dipertanggungjawabkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil suatu kesimpulan, bahwa penerapan akuntabilitas keuangan mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, karena kurangnya kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dilakukan yang mengakibatkan banyaknya sasaran yang belum berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien dan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran belum mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi.

## SARAN

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan :

1. Sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengevaluasi kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan misi organisasi sehingga, tujuan ataupun sasaran pemerintah dapat dicapai dengan maksimal.

Dalam penelitian ini, setiap variabel masih menggunakan kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, dimana tidak semua pernyataan menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini hanya melihat variabel penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variable lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil regresi dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Leverage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 – 2018.
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 – 2018.
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016 – 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

Halim, A dan Kusufi. (2012) *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta

Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.

Lembaga Administrasi Negara. 2003. Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan. 2000 Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta : LAN

Mardiasmo, 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta

Rbkunwas. (2016). *apa itu Akuntabilitas Kinerja*. Youtube Video, 5:55  
[https://www.youtube.com/watch?v=H\\_CeAv2nSw&t=62s](https://www.youtube.com/watch?v=H_CeAv2nSw&t=62s)

Riantarno, R dan Azlina, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip). *Jurnal Pekbis*, 3(3), 560–568.

Rofika, & Ardianto. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Kuansing. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 197–209.

Sugiyono. (2013) *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia.

Willy, A dan Jogiyanto, HM. (2015) *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Andi, Yogyakarta